

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ekonomi Politik

Ekonomi Politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara di selesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (*driven force*) dalam memberikan solusi terhadap kasus – kasus ekonomi. (Hubungan antara Ekonomi dan Politik bisa bermakna eksplanatori (menjelaskan bagaimana keduanya terkait) dan bisa juga bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat perkaitan di antara kedua disiplin ilmu tersebut) (Fahmi, 2013;8).

Menurut Yanuar Ikbar yang dimual di dalam buku Muslim Mufti menjelaskan bahwa politik ekonomi pada dasarnya merupakan unsur atau elemen yang menjadi alat ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melaksanakan rencan – rencana aplikasi ekonomi, untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Mufti, 2013;176). Bahwa pada dasarnya, ekonomi politik merupakan serangkaian tali hubungan yang bersifat saling memengaruhi (Mufti, 2013;177).

Beberapa pendekatan yang ada dalam Ekonomi Politik. Secara teoretis, ada dua pendekatan ekonomi politik yang saling berhadapan, yaitu pendekatan yang berpusat pada pasar (*Market Oriented*) dan pendekatan yang berpusat pada negara (*State Oriented*). Pendekatan yang

berpusat di negara didasarkan asumsi bahwa negara memiliki agenda sendiri dalam hubungannya dengan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Asumsi pendekatan ini sangat bertentangan dengan pendekatan ekonomi politik liberal klasik ataupun turunannya neoliberal, bahwa peran pemerintah relatif dibatasi hanya sebagai penjaga stabilitas, yang memungkinkan pasar menjalankan fungsinya dengan sempurna (Mufti, 2013:193-194).

James A Caporaso dan David P Levine menjelaskan beberapa teori yang ada dalam ekonomi politik di dalam bukunya. Beberapa diantaranya yaitu:

a. pendekatan klasik.

pendekatan klasik dalam buku caporaso dan levine terbagi menjadi dua bagian yang pertama adalah mengenai argumen tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri dan yang kedua adalah mengenai teori nilai dan distribusi. Bagian yang pertama membahas tentang sifat dari sistem pasar dan hubungan antara pasar dan negara. Bagian yang kedua membahas tentang produksi dan penggunaan surplus ekonomi. Bagian kedua ini lebih banyak mengambil dari kontribusi – kontribusi terbaru di masa modern yang menggunakan pendekatan klasik. Dalam pendekatan klasik para pemikir ekonomi politik dari era klasik mengajukan dan menguraikan dua ide utama yaitu bahwa ilmu ekonomi dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dan bahwa bidang

ekonomi politik adalah bidang yang lebih penting daripada yang lain (Caporaso dan Levine, 2015; 68-69)

b. Pendekatan Marxian dalam Ekonomi Politik.

Penganut Marxian ada yang memandang politik sebagai pemisah antara masyarakat sipil dari wilayah publik (di mana hak kesetaraan dianggap hanya ada dalam wilayah publik), politik sebagai peran negara dalam mengelola kepentingan. Pendekatan Marxian terhadap ekonomi politik, berusaha untuk memahami hubungan antara negara dengan perekonomian.

Teori Marxian lebih memfokuskan pada proses – proses reproduksi yang bersifat objektif dan tidak memfokuskan telaaahnya pada proses subjektif yaitu penentuan peringkat peluang atau pembuatan pilihan oleh individu. Konsep kelas merupakan konsep utama dari teori Marxian. Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam teori marxian merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir – pemikir ekonomi klasik. Metode ini menekankan pada ide bahwa perekonomian pasar bekerja menurut prinsip – prinsip reproduksi dan ekspansi sistem kesalingtergantungan material antar orang dengan kata lain pemapagian kerja sosial. Tiga aliran dalam pendekatan Marxian yaitu politik revolusioner, politik kompromi kelas, teori negara marxis (Caporaso dan Levine, 2015; 123-178)

c. Ekonomi Politik Neoklasik.

Ide utama dari pemikiran neoklasik adalah “pilihan yang dibatasi” (*constrained choice*). Konsep ini memandang individu sebagai pelaku utama yang membuat pilihan atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya sendiri tentang dampak dari tiap – tiap alternatif itu bagi dirinya sendiri (Caporaso dan Levine, 2015;184). Membangun sebuah ilmu ekonomi politik berdasarkan pendekatan neoklasik adalah sama dengan mempertimbangkan masalah kegagalan pasar (karena pendekatan neoklasik sebenarnya tidak membutuhkan politik dan lebih menekankan ekonomi, maka politik baru diperlukan ketika kalau ekonominya gagal, atau dengan kata lain kalau pasarnya sudah gagal).

Ekonomi politik neoklasik menelaah situasi – situasi dimana pasar tidak berhasil memberikan peluang kepada individu – individu untuk mencapai level pemenuhan kebutuhan yang semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Caporaso dan Levine, 2015;202)

d. Ekonomi Politik Keynesian

Ekonomi Politik Keynesian mengajukan kritik terhadap konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri yang banyak digunakan oleh para pemikir klasik dan neoklasik. Kritik dari pendekatan keynesian mengatakan bahwa kegagalan untuk menemukan pembeli bisa jadi merupakan masalah sistematis yang tidak ada hubungannya dengan

ketidakcocokan antara apa yang diproduksi dengan apa yang diperlukan, melainkan bisa disebabkan karena kegagalan dari mekanisme pasar itu sendiri untuk menarik pembeli – pembeli yang memiliki daya beli yang cukup. Dengan kata lain pasar gagal untuk mempertemukan permintaan dengan pasokan. (Caporaso dan Levine, 2015;237)

Pemikir Keynesian mengajukan argumen bahwa stabilitas dan kecukupan dari fungsi pasar bisa didapatkan dengan menggunakan mekanisme – mekanisme otomatis, yaitu dengan menggunakan sarana administratif dan bukan politik. Pendekatan Keynesian memfokuskan pada ketidak stabilan proses reproduksi dengan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis. Keynes menyimpulkan bahwa kalau perekonomian kapitalis dibiarkan bekerja tanpa intervensi, maka akan terjadi dimana situasi dimana sumberdaya yang ada tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dari proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai (Caporaso dan Levine, 2015; 238-243).

e. Pendekatan Berbasis Negara dalam Ekonomi Politik.

Dalam pendekatan ini terdapat Pendekatan Utilitarian. Eric Nordlinger berusaha untuk menerapkan pendekatan utilitarian pada negara – negara yang bertindak menurut agenda mereka sendiri. Istilah “Negara” menurut Nordlinger merujuk pada semua individu yang

memegang jabatan dimana jabatan ini memberikan kewenangan kepada individu – individu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen – segmen dalam masyarakat. dalam pandangan Nordlinger Otonomi Negara adalah berbentuk kemampuan dari para pejabat negara untuk melaksanakan pilihan – pilihan mereka dengan cara menterjemahkan pilihan – pilihan itu kedalam kebijakan publik, yang bisa selaras atau bisa juga bertentangan dengan pilihan – pilihan dari orang lain yang bukan pejabat negara (Caporaso dan Levine, 2015;452)

Itulah beberapa teori yang ada dalam ekonomi politik, dimana pada intinya ada pasar yang menguasai negara dan sebaliknya negara yang menguasai pasar. Teori yang akan saya gunakan yaitu ekonomi politik neoklasik khususnya dalam model pendekatan terpusat ke negara ekonomi tidak beroperasi secara bebas dalam ruang hampa, tetapi ada keseimbangan antara pasar dan negara, dimana negara ikut menentukan bagaimana ekonomi beroperasi. Artinya dalam perspektif ekonomi politik neoklasik khususnya dalam model terpusat ke negara kita melihat negara berperan lebih aktif (Deliarnov, 2006:66).

Menurut Caporaso dan Levine (1993) dalam buku deliarnov menyebutkan, pendekatan terpusat ke negara tidak mesti dimulai dengan kegagalan pasar dalam mengidentifikasi peran politik *vis a vis* peran ekonomi. Jika negara punya tujuan – tujuan sendiri, dan jika

dalam upaya mengejar tujuan – tujuan tersebut membawa implikasi terhadap peristiwa –peristiwa ekonomi dan institusi – institusi ekonomi, maka negara bisa mengontrol ekonomi bukan untuk mengontrol kegagalan pasar, tetapi demi mencapai tujuan – tujuannya sendiri. Negara punya kemampuan untuk menentukan dan mengejar agenda yang tidak ditentukan oleh kepentingan privat.

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rufaidah Asalamiah pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mensejahterakan masyarakat Desa Panggungharjo melalui kelomok usaha pengelola sampah (kupas) panggung lestari Sewon, Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini lebih fokus pada mendeskripsikan peran apa saja yang dilakukan oleh BUMDes dalam menanggulangi sampah melalui kupas dan juga dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Desa Panggungharjo. Metode penelitian Deskriptif kualitatif

Penelitian kedua yaitu dari Agung Septian Wijanarko pada tahun 2013 dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Pandankrajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini lebih fokus pada Peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat Desa Pandankrajan, Diharapkan dengan dibentuknya BUMDes dapat mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta penggerak ekonomi desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif

Penelitian ketiga yaitu dari Beni Ferdianto pada tahun 2016 dari Universitas Lampung Fakultas Hukum dengan judul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawnag Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Fokus penelitian ini yaitu tentang Eksistensi BUMDes terhadap Peningkatan pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana dan apa kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Artha Kencana. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif

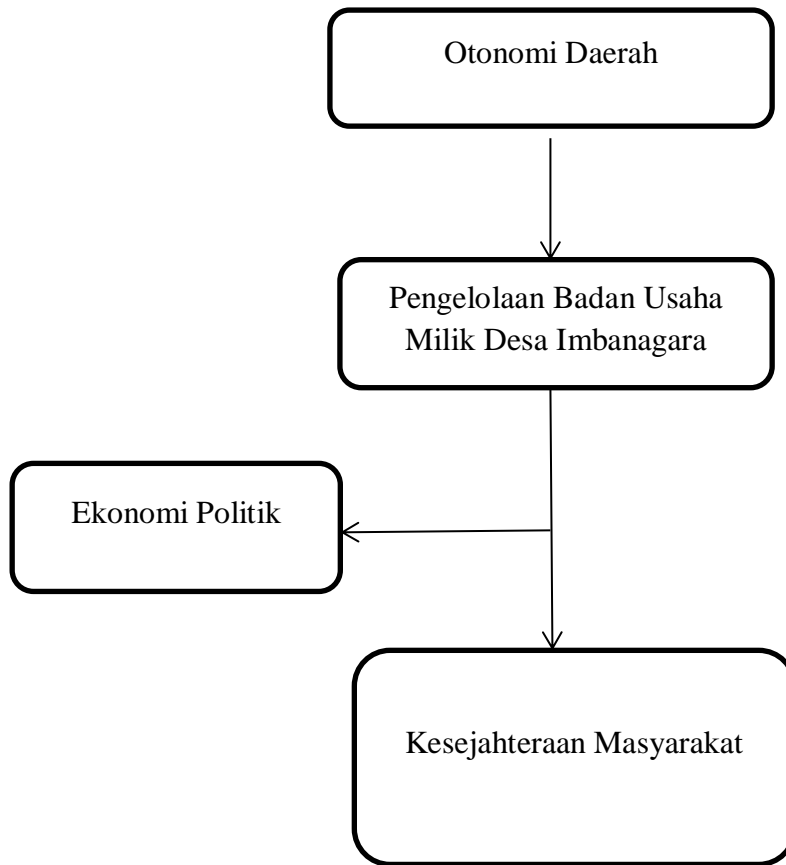
Sementara penelitian yang akan saya lakukan yaitu ekonomi politik di aras lokal (studi tentang pengelolaan badan usaha milik desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa imbanagara raya). Fokus Penelitian ini yaitu tentang pengelolaan BUMDes di Desa Imbanagara Raya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Imbanagara Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Tabel 2 Matriks Perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama dan Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian
1	Rufaidah Asalamia Peran badan usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mensejahterakan masyarakat Desa Panggungharjo melalui kelomok usaha pengelola sampah (kupas) panggung lestari Sewon, Bantul, Yogyakarta	Lebih Fokus pada mendeskripsikan peran apa saja yang dilakukan oleh bumdes dalam menanggulangi sampah melalui kupas dan juga dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Desa Panggungharjo	Metode Penelitian Kualitatif
2	Agung Septian Peran badan usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlangi Kabupaten Mojokerto	Penelitian lebih fokus pada, Peran BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat Desa Pandankrajan, Diharapkan dengan dibentuknya BUMDes dapat mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta penggerak ekonomi desa	Metode Penelitian Kualitatif
3	Beni Ferdianto. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulang	Penelitian ini lebih fokus pada Eksistensi BUMDes terhadap Peningkatan pendapatan Asli Desa di Tiyuh	Metode Penelitian Kualitatif

	Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Candra Kencana dan apa kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Artha Kencana	
4	Ajeng Thyanty Maranda Ekonomi Politik di Aras Lokal (Studi Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Imbanagara Raya)	Fokus Penelitian ini yaitu pada pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Imbangara Raya.	Metode Penelitian Kualitatif

2. Kerangka Pemikiran



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

Adapun maksud dari kerangka pemikiran di atas yaitu berawal dari adanya otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dengan adanya otonomi daerah dibentuklah otonomi desa sebagai lanjutan dari otonomi daerah. Otonomi desa ialah merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.

Karena adanya otonomi desa maka desa bisa mengatur dan mengurus urusannya sendiri termasuk dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dengan mendirikan BUMDEs (Badan Usaha Milik Desa) sebagai salah satu sarana yang menampung pembuatan usaha yang dilakukan di desa. Desa Imbanagara Raya mendirikan BUMDes pada tahun 2015 dengan beberapa unit usaha diantaranya Pengelolaan Air Bersih, Pabrik Kerupuk yang sudah berjalan dan akan berjalan yaitu perkreditan dan kios. Pemerintah Desa memberikan dana yang cukup besar dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan total Rp. 336.750.000. BUMDes di bangun untuk menggali potensi yang ada di desa untuk mensejahterakan masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian desa.

Pembentukan BUMDes Imbanagara Raya tentu dengan beberapa tujuan yang intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian desa. Dalam perjalanannya terdapat unsur ekonomi politik didalamnya dimana ada tindakan ekonomi dan proses politik yang

merupakan inti objek kajian ekonomi. BUMDes dibentuk melalui musyawarah bersama antara Pemerintah Desa, BPD atau masyarakat yang kemudian disahkan dalam bentuk peraturan desa.

Dengan terbentuknya BUMDes, diharapkan adanya peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang optimal.